

Analisis Strategi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terorisme

Wisnu Jaka Saputra

Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

E-mail: wisnujakas@gmail.com

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Wilayah administratif DIY terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo serta 1 (satu) kotamadya yaitu Kota Yogyakarta, dengan total penduduk di tahun 2020 berjumlah 3.882.288 jiwa. Penyebaran paham radikal, radikalisasi dan terorisme terjadi bukan di ruang vakum tetapi terjadi di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan alamiah DIY. Polda DIY sebagai institusi negara yang bertugas untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif dalam bekerja tentu tidak bisa sendiri tetapi selalu dengan dukungan, kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Idealnya dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak eksternal dalam melaksanakan tugas mewujudkan Kamtibmas tersebut sudah tidak ada lagi tindakan radikal dan aksi terorisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data secara mendalam dan lebih jelas mengenai fenomena terorisme dan strategi penanggulangannya oleh Polda DIY. Hasil Penelitian ini adalah strategi Polda DIY dalam penanggulangan terorisme adalah dengan lebih dititikberatkan pada program kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme tanpa menenggalkan program kegiatan penegakan hukum bagi para pelaku teror baik yang sedang merencanakan maupun yang telah melakukan aksi terorisme serta melakukan upaya deradikalisasi bagi eks Napiter, returnis dan deportan pendukung ISIS. Program tersebut bernama *quick wins*, kegiatan penanggulangan terorisme tersebut dilakukan oleh 10 satuan kerja di tingkat Polda DIY dengan melibatkan partisipasi 5 unsur penanggulangan bencana yang disebut pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan akademisi/peneliti terorisme.

Kata Kunci : Strategi Kepolisian, Terorisme, Radikalisme. Yogyakarta.

1. PENDAHULUAN

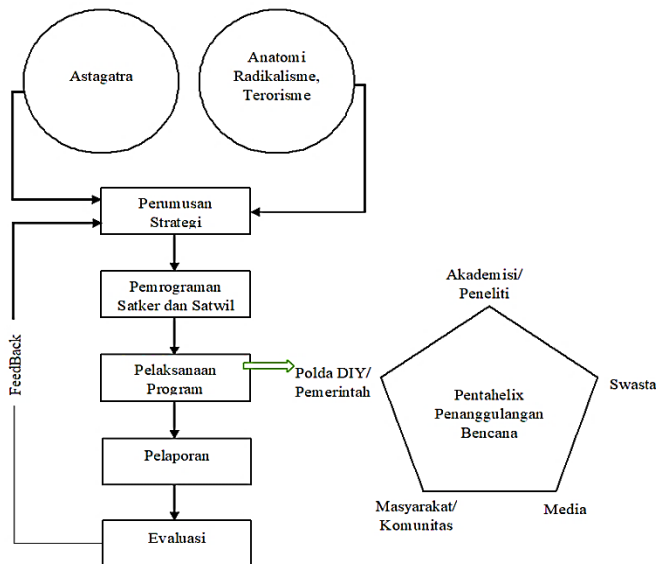
1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering juga disebut dengan singkatan DIY merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Wilayah administratif DIY terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo serta 1 (satu) kotamadya yaitu Kota Yogyakarta, dengan total penduduk di tahun 2020 berjumlah 3.882.288 jiwa (BPS DIY, 2021). Berbagai kegiatan penduduk dan warga yang berada di DIY tersebut dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan serta memenuhi kebutuhan pribadinya. Aktivitas masyarakat di DIY tersebut terganggu dengan sejumlah kejadian terkait dengan radikalisme dan aksi terorisme. Menurut Mahfud M.D, radikal dalam makna stipulatif (kata lama dengan pemaknaan baru) menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 adalah tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem yang telah disepakati dengan cara kekerasan. Dari pengertian tersebut Mahfud, M.D., mengelompokkan radikalisme menjadi 3 (tiga) yaitu radikal dalam ideologi atau wacana, takfiri (mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya kemudian mengejek, mendiskriminasi dan intoleran) serta yang terakhir adalah jihadis (para pelaku penyerangan, pembunuhan, pengeboman yang menimbulkan korban jiwa).

Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi DIY melakukan penelitian dengan metode survey di 4 (empat) kabupaten dan kota Yogyakarta untuk memetakan potensi radikalisme di DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap kabupaten/kota memiliki narasi yang berbeda-beda pada gejala radikalisme. Di Kulonprogo isu khilafah menjadi gejala yang tinggi dari radikalisme, sedangkan penegakan syariah di Gunungkidul, gerakan masif fundamental di Sleman dan untuk di Kota Yogyakarta tidak dapat diidentifikasi karena lebih bersifat plural. Namun di tahun 2017 FKPT Provinsi DIY kembali melakukan penelitian tentang potensi radikalisme dan hasilnya menunjukkan bahwa DIY sudah tidak termasuk provinsi rawan radikalisme. (Ditintelkam Polda DIY, 2020)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syaifuddin, 2018) bahwa usaha yang dilakukan oleh FKPT-DIY dalam upaya deradikalisasi terhadap paham terorisme yaitu melalui berbagai bentuk kegiatan baik seminar, lokakarya, pelatihan, workshop, lombamedia deradikalisasi, penelitian. Berbagai agenda dan kegiatan ini tercakup dalam berbagai divisi yang menasar berbagai kalangan, diantaranya: divisi penelitian dankajian, divisi pemberdayaan pendidikan dan agama, divisi pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi, divisi pemberdayaan pemuda dan perempuan, dan divisi pemberdayaan media massa. [1]

Di tahun 2020, Saleh melakukan penelitian tentang gejala radikalisme pada siswa SLTA di Kota Yogyakarta dan strategi penanggulangannya. Hasil penelitian Saleh antara lain menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor determinan yang mempengaruhi



tumbuhnya gejala radikalisme di kalangan remaja sekolah, yaitu: pengaruh media digital dan media online yang berisi kajian keagamaan Islam berhaluan keras, transmisi pemahaman Islam Salafi yang berhaluan keras, pengaruh jaringan alumni yang terlebih dahulu terpapar radikalisme dan pesimisme terhadap keadilan serta kesejahteraan sosial. (Ditintelkam Polda DIY, 2020)

Penyebaran paham radikal, radikalisasi dan terorisme terjadi bukan di ruang vakum tetapi terjadi di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan alamiah DIY. Dalam paradigma ketahanan nasional, lingkungan sosial masyarakat dapat meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dikenal dengan istilah pancagatra. Sedangkan lingkungan alamiah meliputi aspek demografi/kependudukan, kondisi geografis wilayah dan potensi kekayaan alamnya yang sering disebut dengan istilah trigatra. Selanjutnya antara aspek pancagatra dan trigatra jika digabung menjadi aspek astagatra (Soemarsono dkk, 2001). [2]

Penanganan terorisme pada umumnya selalu dikaitkan dengan peran lembaga keamanan dan hukum suatu negara seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan penjara. Namun demikian dalam beberapa decade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensi untuk memahami, mencegah, dan menanganinya melalui pelibatan berbagai bidang dan disiplin ilmu termasuk bidang agama, komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial dan sebagainya [3] (Guru, 2010).

Polda DIY sebagai institusi negara yang bertugas untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif dalam bekerja tentu tidak bisa sendiri tetapi selalu dengan dukungan, kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak eksternal seperti institusi lain, masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok media massa. Dengan pelibatan berbagai pihak eksternal tersebut diharapkan agar hasil kinerja lebih optimal. Pendekatan partisipatif yang demikian tersebut dalam manajemen penanggulangan bencana biasa disebut pendekatan partisipatif pentahelix. Idealnya dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak eksternal dalam melaksanakan tugas mewujudkan Kamtibmas tersebut sudah tidak ada lagi tindakan radikal dan aksi terorisme di DIY. Oleh karena itu kiranya perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan strategi Polda DIY dalam menanggulangi terorisme.

1.2 Tujuan

Adapun maksud peneliti dengan melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang strategi Polda DIY dalam menanggulangi terorisme yang meliputi hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian. Alur pikir dari penelitian ini akan digambarkan pada gambar di bawah ini

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

2. METODOLOGI

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di DIY dan secara khusus dilakukan di Kantor Polda DIY atau tempat lain yang mampu menyediakan data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa data tentang terorisme di Yogyakarta merupakan data-data yang bersifat khusus bahkan rahasia yang dikelola oleh kepolisian dan selama ini untuk penanggulangan terorisme lebih dominan dilakukan oleh Polda DIY serta pada umumnya pihak lain yang ikut menanggulangi terorisme juga memperoleh masukan informasi tentang terorisme juga dari Polda DIY. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2021.

2.2 Sampling dan Analisis Sampling

Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yaitu studi kasus, penelitian ini berupaya untuk memperoleh data secara mendalam dan lebih jelas mengenai fenomena terorisme dan strategi penanggulangannya oleh Polda DIY secara mendalam dengan mengumpulkan data rinci dan lengkap.

Subjek penelitian adalah individu atau hal ataupun benda yang dijadikan sebagai tempat perolehan data yang berguna untuk keperluan variabel penelitian dan permasalahan (Suharsimi, 2011) [4]. Subjek yang dipilih dan digunakan pada penelitian ini berjumlah 9 orang dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Narasumber Penelitian

No	Jabatan/Status
1	Pejabat atau anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.
2	Pejabat pada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Biro Rena) Polda DIY
3	Pejabat atau anggota Direktorat Intelijen Keamanan Polda DIY
4	Pejabat atau anggota Direktorat Binmas Polda DIY
5	Pejabat atau anggota Direktorat Sabhara Polda DIY
6	Pejabat atau anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY
7	Pejabat atau anggota Bidang Humas Polda DIY
8	Akademisi Pengamat Terorisme dan ahli (pernah melakukan riset atau penanggulangan tentang terorisme).
9	Mantan narapidana terorisme dan teroris di Yogyakarta serta sekitarnya

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel secara *purposive* yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui lebih dahulu. (Notoatmodjo, 2014). [5]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas sempit, seperti memperhatikan sesuatu atau objek dengan menggunakan mata. Dalam pengertian psikologi observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera. (Suharsimi, 2010). [4]

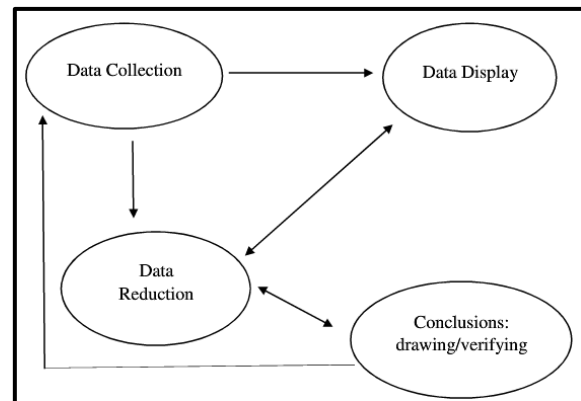
2. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*).

Wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang memiliki alternatif jawaban didalamnya. Dengan wawancara terstruktur ini setiap narasumber/responden diberi pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2017). [6]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu seperti dokumen tertentu, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan bisa seperti catatan harian, kisah kehidupan, biografi, dan tulisan yang berisi peraturan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaksi menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung terus-menerus hingga tuntas sampai data tersebut bersifat jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification. Untuk lebih jelasnya aktivitas analisis data dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 2. Komponen dalam Analisis data (Sugiyono, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Polda DIY dalam Menanggulangi Terorisme

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Polda DIY juga melaksanakan penanggulangan terorisme yang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 [7] menyebutkan bahwa terorisme termasuk dalam ragam bencana sosial. Dalam pandangan hukum terorisme termasuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak yang luas dapat menyebabkan korban jiwa yang banyak, kerugian materiil yang besar dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat.

Sejak beberapa tahun yang lalu hingga akhir tahun 2020 untuk dapat dengan segera menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif pimpinan Polri telah membuat program kegiatan yang diberi nama *quick wins*. Program *quick wins* Polri tersebut antara lain adalah untuk menanggulangi terorisme. Ada 3 program kegiatan *quick wins* dalam rangka menanggulangi terorisme yaitu:

1. Program kegiatan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal serta anti-Pancasila.
2. Program kegiatan perburuan dan penangkapan gembong serta jejaring terorisme.
3. Program kegiatan membentuk dan mengefektifkan Satuan Tugas Operasi (Satgasops) Kepolisian kontraradikalisasi serta deradikalisasi (khusus ISIS).

Untuk menentukan berbagai program kegiatan dalam program *quick wins* pertama hingga ketiga dalam penanggulangan terorisme, Polda DIY melalui Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Biro Rena) melaksanakan perumusan strategi penanggulangan terorisme di DIY. Bahan yang digunakan untuk perumusan strategi tersebut meliputi dokumen Intel Dasar Polda DIY tahun 2020, dokumen Perkiraan Intelijen tentang Keadaan Radikalisme dan Terorisme di DIY (kedua dokumen tersebut disusun oleh Ditintelkam) serta dokumen tentang kondisi faktual internal Polda DIY yang disusun oleh Biro Rena Polda DIY. Jika dianalisis dari tahap-tahap penanggulangan bencana, tahap dan kegiatan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Polda DIY dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1). Pra Bencana Terorisme:

- a. Deteksi dini
 - Penyelidikan intelijen pada potensi penyebaran radikalisme, terorisme dan anti-Pancasila.
 - Pendataan individu dan kelompok radikal, teroris serta anti-Pancasila.
 - Pendataan dan pemetaan kelompok pendukung dan tidak mendukung ISIS.
 - *Cyber patrol*.
- b. Mitigasi
 - Membuat Petunjuk Arahan (Jukrah) kepada internal tentang radikalisme, terorisme & 4 pilar kebangsaan.
 - Rakor dengan fungsi terkait tentang organisasi radikal dan anti Pancasila.
 - Sosialisasi tentang radikalisme & terorisme kepada personel Polda DIY.
 - Menyelenggarakan pelatihan komunikasi efektif tentang organisasi radikal dan anti-Pancasila.
 - Mengirim personel untuk Diklat antiteror ke dalam dan luar negeri.
 - Penyuluhan bersama instansi terkait di sekolah-sekolah, kelompok masyarakat dan Ormas.
 - Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan pada Satbrimob Polda.
 - Menyelenggarakan latihan khusus bagi Tim Penindak kelompok radikal dan anti-Pancasila.
 - Menyediakan personel untuk Satgas Penanggulangan Terorisme.
 - Penyiapan personel yang mengawaki layanan kesehatan & obat-obatan dukungan kesehatan. Kerjasama Biddokkes dengan Dinkes, PMI, Fakultas Kedokteran setempat dan LSM.
 - Bakti kesehatan kepada masyarakat dalam rangka cipta kondisi.
 - Menyelenggarakan FGD tentang kontraradikalisasi bersama dengan Dinas Kesbangpol, Departemen Agama, Dinas

Pendidikan Provinsi DIY, Perwakilan Perguruan Tinggi dan Sekolah, Perwakilan mahasiswa dan pelajar, Pengelola Ponpes dan eks Napiter.

- Pembentukan jaringan intelijen.
 - Penggalangan dalam rangka kontraradikalisasi dan deradikalisasi.
 - Menyambangi warga serta kunjungan kepada tokoh agama, masyarakat adat, pemuda majelis keagamaan, Ormas keagamaan tentang kontra radikalisasi.
 - Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) kepada tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, majelis keagamaan, Ormas keagamaan tentang kontra radikalisasi. Penyuluhan bersama Tomas, Toga, Todat dan instansi terkait di sekolah-sekolah, komunitas masyarakat, kelompok, organisasi masyarakat.
 - Meningkatkan kerjasama antara Bidhumas dengan media massa serta jurnalis di DIY dalam pemberitaan terkait radikalisme serta terorisme.
 - Kerja sama antara Polda DIY dengan beberapa vendor seluler dan perusahaan teknologi komunikasi untuk menanggulangi penyebaran radikalisme dan terorisme.
- c. Pencegahan
 - Ditsamapta melaksanakan patroli dialogis kepada masyarakat.
 - Menyambangi masyarakat pesisir.
 - Mengunjungi tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, majelis keagamaan dan Ormas.
 - Menyambangi tokoh agama, masyarakat, adat.
 - d. Peringatan dini
 - Mempublikasikan bahaya terorisme melalui leaflet, media cetak & elektronik, online serta media sosial sehingga timbul pemahaman masyarakat untuk mengamankan diri sendiri, lingkungan keluarga dan tempat tinggal.
- 2. Tanggap Darurat Bencana Terorisme:**
- Menyelidiki keberadaan teroris di wilayahnya.
 - Pendalaman serta pemanfaatan peta kelompok pendukung ISIS untuk kepentingan Sub Satgas Deradikalisasi.
 - Update data, pendalaman dan pemanfaatan data target operasi.
 - Layanan kesehatan bagi korban, petugas dan teroris yang terluka.
 - Bergabung dalam Satgasops Kepolisian kontraradikalisasi dan deradikalisasi (khusus ISIS).
 - Menjadi pasukan siaga pemburuan gembong & pelaku terror di seluruh wilayah
 - Pergeseran pasukan pada tingkat Polda dan Polres dalam rangka *back up* wilayah.

- Perbantuan selaku Tim penindak kelompok radikal dan anti-Pancasila.
 - Penertiban dan atau penegakan hukum terhadap organisasi radikal dan anti-Pancasila.
- 3. Pascateror:**
- Deradikalisasi eks Napiter, returnis, deportan & orang atau kelompok yang radikal.
 - Menugaskan personel dengan kemampuan khusus untuk merawat anak dan keluarga Napiter.
 - Pemberian reward bagi personel yang berprestasi dalam penanggulangan terorisme.

Dalam rangka menanggulangi terorisme, Kabid Humas Polda DIY menyampaikan bahwa ketika terjadi aksi teror maupun penangkapan teroris di wilayah Polda DIY maka Bidhumas akan segera memberikan informasi kepada masyarakat bisa secara langsung dan melalui bantuan media massa dengan cara menggelar *press release*.



Gambar 3. Keterangan Pers Kabid Humas Polda DIY

Sumber: Dokumen Bidhumas Polda DIY

Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda DIY pun berpartisipasi dalam penanggulangan terorisme. Kasubdit Tugas Umum (Gasum), menyampaikan bahwa dalam rangka penanggulangan terorisme Ditsamapta Polda DIY berperan dalam pencegahan, penegakan hukum maupun pengamanan pasca terjadi teror. Dalam pencegahan terorisme Ditsamapta mengedepankan patrol dialogis dengan masyarakat yang dijumpai saat patroli. Dari komunikasi yang dibangun oleh petugas Samapta dengan masyarakat diharapkan akan terbangun keakraban, masyarakat akan mau menerima himbuan untuk mewaspadai penyebaran radikalisme dan berpartisipasi mencegah aksi teror di DIY. Diharapkan agar masyarakat juga tidak sungkan memberi informasi kepada petugas patrol jika mengetahui adanya penyebaran paham radikal atau kegiatan terkait terorisme.



Gambar 4: Patroli Dialogis Ditsamapta Polda DIY

Sumber: Dokumen Ditsamapta Polda DIY

Dalam upaya untuk menanggulangi terorisme di DIY, ada Satuan Brimob Polda DIY yang merupakan sebuah satuan pasukan taktis yang antara lain memiliki kualifikasi kemampuan melawan teror (Wanteror). Untuk mewujudkan kondisi selalu siap menertibkan kelompok radikal dan anti-pancasila serta memberantas terorisme di DIY, Satbrimob melakukan berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun dalam ikatan pasukan taktis perlawanan teror.



Gambar 5: Satbrimob Polda DIY Latihan Perlawanan Teror

Sumber: Dokumen Satbrimob Polda DIY

Dalam manajemen penanggulangan bencana secara umum yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan pendekatan partisipasi pentahelix. Pendekatan ini mengandung maksud bahwa agar penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien maka perlu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, swasta dan akademisi/peneliti. Pendekatan partisipasi pentahelix ini juga diadopsi dan diterapkan oleh Polda DIY dalam manajemen penanggulangan terorisme.

Dari program kegiatan *quick wins* penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Polda DIY secara jelas tergambar bahwa telah melibatkan Dinas Kesbangpol di Pemprov, Pemkab dan Pemkot Yogyakarta, Depag, Dinas Kominfo (unsur pemerintah); pelajar, mahasiswa, Tomas, Toga, Todat, individu, Yayasan Gema Salam, Yayasan Lingkar Perdamaian, PMI, Komunitas Relawan Bencana (unsur masyarakat); perusahaan vendor seluler, perusahaan teknologi komunikasi (unsur swasta), segenap media massa di DIY (unsur media) dan; Forum Koordinasi Pencegahan

Terorisme Provinsi DIY, UGM, UII, Amikom, Pongpes dll (peneliti & akademisi). Dari kelima unsur utama yang dilibatkan oleh Polda DIY dalam menanggulangi terorisme tersebut maka dapat dimaknai jika telah menerapkan pendekatan partisipasi pentahelix.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Strategi Polda DIY dalam penanggulangan terorisme di DIY adalah dengan lebih dititikberatkan pada program kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme tanpa meninggalkan program kegiatan penegakan hukum bagi para pelaku teror baik yang sedang merencanakan maupun yang telah melakukan aksi terorisme serta melakukan upaya deradikalisasi bagi eks Napiter, returnis dan deportan pendukung ISIS. Program-program kegiatan penanggulangan terorisme tersebut dilakukan oleh 10 (sepuluh) satuan kerja di tingkat Polda DIY dengan melibatkan partisipasi 5 (lima) unsur penanggulangan bencana yang disebut pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan akademisi/peneliti terorisme.

4.2 Rekomendasi dan Saran

1. Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat menimbulkan korban baik jiwa, kesehatan, kerugian harta benda yang besar serta menimbulkan ketakutan/ancaman psikologis yang luas di masyarakat dan kejahatan yang luar biasa ini secara sadar dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang menysar kepada masyarakat. Oleh karenanya terorisme dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dikategorikan sebagai sebuah bencana sosial. Terorisme agar dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien perlu melibatkan semua pihak yang setidaknya terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok peneliti/akademisi. Mendasari atas hal tersebut maka direkomendasikan agar unsur-unsur para pihak di atas lebih meningkatkan perannya dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk dilakukan penelitian-penelitian terkait penanggulangan terorisme yang lainnya sehingga akan memperkaya khasanah ilmu manajemen penanggulangan bencana khususnya bencana sosial terorisme dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau upaya penanggulangan radikalisme serta terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaifuddin, *Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta (FKPT-DIY) Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Inklusif Sebagai Upaya Deradikalisasi Paham Terorisme*, Universitas

Alma Ata Yogyakarta, 2018.

- [2] Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [3] Guru, S, *Social Work and the 'War on Terror'*, The British Journal of Social Work, 2010. Vol 40 (1), 272-289.
- [4] Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011.
- [5] Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014.
- [6] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- [7] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- [8] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.